



**DINAS PARIWISATA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

# **RENSTRA DINAS PARIWISATA 2016 - 2021**

# DAFTAR ISI

---

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>II</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ....</b>	<b>9</b>
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .	9
2.2. SUMBER DAYA .....	16
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA .....	19
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	20
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN .....</b>	<b>22</b>
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	22
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 24	
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PARIWISATA .....	27
3.4. TELAAHAN RTRW DAN KLHS.....	36
3.4.1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.....	36
3.4.2 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	36
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	37
<b>BAB IV TUJUAN &amp; SASARAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. TUJUAN DAN SASARAN .....	42
<b>BAB V STRATEGI &amp; KEBIJAKAN.....</b>	<b>44</b>
5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	44
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM &amp; KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>56</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>57</b>

## KATA PENGANTAR

---



Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis sebagai sasaran dan tujuan OPD untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur.

Rencana Strategi (Renstra) OPD merupakan penjabaran pada hasil yang akan dicapai oleh OPD dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan atau potensi, hambatan dan peluang yang akan timbul.

Adapun penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merupakan dokumen yang dijadikan pedoman bagi Dinas Pariwisata dalam menjalankan roda pemerintahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata 2016-2021.

Tanjung Selor, 15 Agustus 2017

Kepala Dinas Pariwisata,

**Ir. H. Ahmad Hairani, MM.MT**  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 196208261992031005



## 1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi termuda di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. Sebagai Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang lainnya mengamanatkan agar pemerintah daerah wajib mempersiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis sesuai dengan RPJM Daerah yang ada sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis yang disusun dimana yang disebut Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJM Daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Pada tahun 2016 Provinsi Kalimantan Utara membentuk Organisasi Perangkat Daerah baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Kalimantan Utara yang terus bergerak dinamis dimana perangkat daerah tersebut penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka seluruh pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Perubahan perangkat daerah harus diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan penganggaran. Amanat ini direspon oleh Provinsi Kalimantan Utara dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



Dengan adanya kondisi bahwa Perda tentang RPJMD Kalimantan Utara ditetapkan sebelum penetapan Perda tentang perangkat daerah yang baru, maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara melakukan evaluasi RPJMD di awal Tahun 2017.

Seyogyanya, pelaksanaan evaluasi hasil RPJMD dilakukan setelah RPJMD dilaksanakan 1

tahun untuk mengetahui kinerja dan pencapaian target-target pembangunan. Namun mengingat pentingnya penataan kembali atau penyesuaian dokumen rencana dan anggaran dengan perangkat daerah yang baru sesuai kebijakan pemerintah pusat, maka evaluasi terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dilakukan.



Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, maka direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Hal ini dimungkinkan sebab memiliki beberapa acuan dasar hukum, sebagai berikut:

- a. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
  - 1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
  - 2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
  - 3) Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - 4) Merugikan kepentingan nasional.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 282 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah

sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 telah menggunakan urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah yang baru. Dengan kondisi ini, maka terjadi ketidakselarasan urusan dan program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan APBD Tahun 2017 sebab program di RPJMD masih menggunakan perangkat daerah yang lama.
4. Hasil evaluasi RPJMD terhadap konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke Perubahan RKPD Tahun 2017 dan APBD Tahun 2017, diketahui bahwa program RPJMD Tahun 2017 cukup banyak yang mengalami perubahan nama perangkat daerah sebagai penanggung jawab/pengampu program tersebut. Demikian pula terdapat program-program yang pindah ke perangkat daerah lain, ada penambahan program, dan bahkan ada program yang tidak dianggarkan/dimuat dalam APBD Tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya perubahan perangkat daerah sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016.

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu perangkat daerah yang baru dibentuk pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dimana sebelumnya urusan pariwisata merupakan bagian dari Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sebagai Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara. Renstra yang disusun merupakan acuan kerja bagi Dinas Pariwisata selama 5 (lima) tahun kedepan yang mana sesuai dengan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021. Selanjutnya Renstra Dinas Pariwisata yang telah disusun merupakan acuan wajib dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan penjabaran dari Renstra.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara ialah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara:5/237/2016);
16. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara ini ialah sebagai dokumen perencanaan Dinas Pariwisata untuk periode lima tahun ke depan agar lebih terarah, efektif dan efisien serta terpadu sesuai dengan RPJPN Nasional dan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Selain itu penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dapat menjadi acuan resmi bagi unit kerja Dinas Pariwisata dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD

Provinsi Kalimantan Utara serta menyediakan tolak ukur kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan tujuan dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara ialah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara selama periode 2016-2021;
2. Teridentifikasinya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 5 tahun kedepan selama periode 2016-2021;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dalam periode 5 tahun kedepan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, sesuai yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. *BAB I Pendahuluan*, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan;
- b. *BAB II, Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara*, terdiri atas uraian terkait gambaran Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. *BAB III, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pariwisata*, mengemukakan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Rentsra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, kemudian Penentuan Isu-isu Strategis;
- d. *BAB IV, Tujuan dan Sasaran*, menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

- e. *BAB V, Strategi dan Arah Kebijakan* mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima Tahun mendatang
- f. *BAB VI, Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan*, mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, memuat perencanaan program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan;
- g. *BAB VII, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Strategi* Indikator Kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat indikator kinerja Dinas Pariwisata selama 5 tahun kedepan;
- h. *BAB VIII, Penutup*.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

---

### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Dinas pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Destinasi Pariwisata;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pemasaran Pariwisata;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dari masing-masing struktur dalam organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dapat diuraikan masing-masing dalam Tabel berikut:

Tabel 2.1. Uraian Jabatan dan Tugas Pokok Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara

Jabatan	Tugas Pokok
<b>Kepala Dinas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan anggaran dan program (Renstra, RKA/DPA, dan Renja) Dinas Pariwisata jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja ;</li> <li>b. Merencanakan kebijakan teknis kepariwisataan yang meliputi kesekretariatan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia serta tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;</li> <li>c. Merencanakan solusi pemecahan terhadap permasalahan pariwisata yang meliputi kesekretariatan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia serta tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;</li> <li>d. Merencanakan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia ;</li> <li>e. Merencanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;</li> <li>f. Merumuskan pedoman kerja dinas pariwisata berdasarkan program kerja agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> <li>g. Mengendalikan pelaksanaan tugas ketatausahaan biro dan teknis operasional urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelayanan informasi dinas serta pengelolaan barang dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja ;</li> <li>h. Menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia baik dari dalam maupun luar negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> <li>i. Mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata yang meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif, serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia dengan instansi/unit kerja terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik ;</li> <li>j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana tugas dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja ;</li> <li>k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur sehubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan bidang pariwisata ;</li> <li>l. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing ;</li> </ul>

Jabatan	Tugas Pokok
Sekretaris	m. Membina bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing
	n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja
	a. Merumuskan bahan rencana anggaran dan program kerja (RKA) kesekretariatan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar keterpaduan dan keserasian kerja
	b. Merumuskan bahan/telaahan staf kerjasama dengan instansi terkait pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif serta industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia baik dari dalam maupun luar negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan
	c. Merumuskan bahan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesekretariatan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
	d. Merumuskan bahan penyusunan standar, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesekretariatan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai rencana;
	e. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja ;
	f. Mengkoordinasikan penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan di dinas pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja ;
	g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dinas pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	h. Memantau urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat dinas pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
	i. Memantau kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	j. Menginventarisir setiap permasalahan yang dihadapi pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Kalimantan Utara guna mencari solusi pemecahannya sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal;
	k. Menginventarisir penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja dan rencana anggaran (Renstra, Renja, RKA/DPA) Dinas Pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja ;
	l. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi di bidang kesekretariatan dan pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
	m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal;
	n. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;

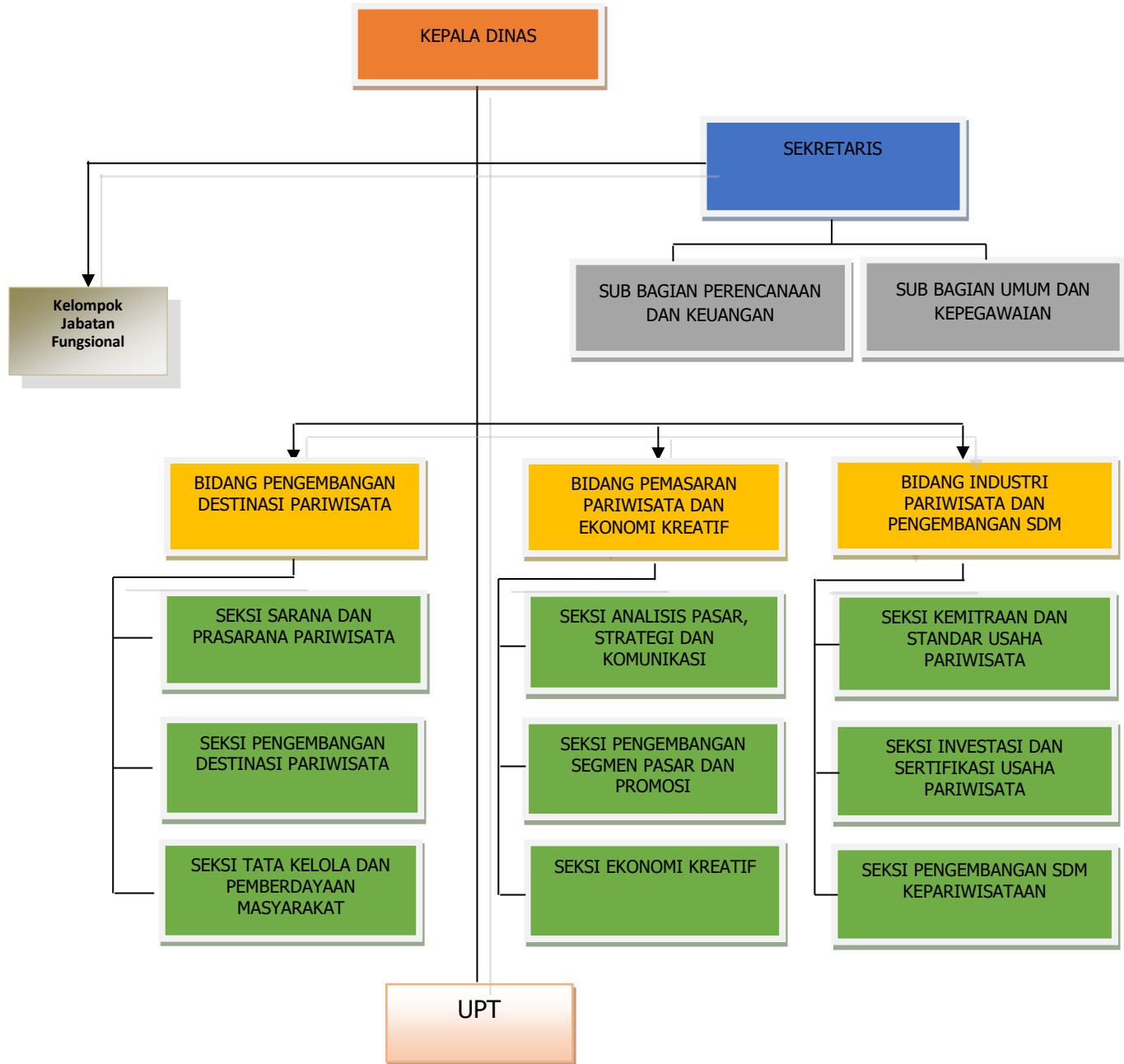
Jabatan	Tugas Pokok
<b>Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	o. Membina bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
	p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
	a. Merumuskan bahan rencana anggaran dan program kerja pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
	b. Merumuskan bahan-bahan fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	c. Merumuskan bahan rencana kinerja bidang pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	d. Merumuskan bahan koordinasi untuk mengembangkan destinasi pariwisata dengan instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	e. Merumuskan bahan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	f. Merumuskan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman petunjuk operasional di bidang pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	g. Merumuskan bahan kebijakan teknis penyusunan dan penyelenggaraan manajemen kepariwisataan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	h. Merumuskan bahan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	i. Merumuskan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan destinasi pariwisata sebagai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
	j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan guna dicarikan solusi pemecahannya yang berhubungan dengan pengembangan destinasi pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
<b>Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	k. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
	l. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik;
	m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
	a. Merumuskan bahan rencana anggaran dan program kerja (RKA) bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja
	b. Merumuskan bahan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar/dengan kabupaten/kota dan



Jabatan	Tugas Pokok
Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	<p><i>stakeholder</i> pariwisata lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Merumuskan bahan-bahan terkait pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas</li> <li>d. Merumuskan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> <li>e. Merumuskan kebijakan teknis terkait analisis pasar, strategi dan komunikasi, pengembangan segmen pasar dan promosi, serta ekonomi kreatif sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> <li>f. Merumuskan bahan kegiatan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi serta lembaga-lembaga pariwisata seperti ASITA, PHRI, HPI, PUTRI dan instansi-instansi terkait baik di dalam maupun luar negeri dalam upaya meningkatkan kemitraan untuk pengembangan pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana telah direncanakan</li> <li>g. Merumuskan bahan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> <li>h. Mengembangkan dan memantau pusat informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> <li>i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan solusi pemecahannya yang berhubungan dengan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif ;</li> <li>j. Mengembangkan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam dan luar negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;</li> <li>k. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;</li> <li>l. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik</li> <li>m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.</li> <li>a. Merumuskan bahan rencana anggaran dan program kerja (RKA) bidang industri jasa dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> <li>b. Merumuskan bahan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> <li>c. Merumuskan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> <li>d. Merumuskan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama terkait industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia antar <i>stakeholder</i> baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> </ul>

Jabatan	Tugas Pokok
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Merumuskan bahan fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> <li>f. Merumuskan bahan kegiatan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik di dalam maupun luar negeri dalam upaya meningkatkan industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik</li> <li>g. Merumuskan bahan kebijakan teknis penyusunan dan penyelenggaraan industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik</li> <li>h. Merumuskan bahan laporan pertanggungjawaban kegiatan industri pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik</li> <li>i. Merumuskan bahan pengawasan industri pariwisata (pertunjukkan grup kesenian, usaha perhotelan, rumah makan, bar, restoran, gelanggang, taman rekreasi, taman laut, pemandian alam dan pondok wisata) sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja</li> <li>j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan guna dicarikan solusi pemecahanannya yang berhubungan dengan industri jasa pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsinya agar mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;</li> <li>k. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing</li> <li>l. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik</li> <li>m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.</li> </ul>

Struktur organisasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

## 2.2. SUMBER DAYA

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misalnya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi.

Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara memiliki pegawai sebanyak 35 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 15 orang tenaga honorer (pegawai tidak tetap) sehingga total sumber daya manusia yang dimiliki adalah 50 personel.

Adapun pemetaan didasarkan atas jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2. Jumlah Sumber Daya Manusia

JABATAN	JUMLAH
KEPALA DINAS	1
SEKRETARIS	1
BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	8
BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	7
BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN SDM	6
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	7
BAGIAN UMUM	5
PEGAWAI TIDAK TETAP	15

*Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2018*

Adapun data ASN menurut golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai

berikut:

Tabel 2.3 Data ASN Menurut Golongan

NO	UNIT JABATAN	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	3	3
4.	Kepala Seksi	-	-	5	3	8
5.	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	2
6.	Pelaksana	-	3	16	1	20
	JUMLAH		3	23	9	35

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2018

Berdasarkan Tabel 2.3. Data ASN Menurut Golongan, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara memiliki pegawai sebanyak 3 orang di Golongan II, 23 orang di Golongan III, dan 9 orang di Golongan IV.

Tabel 2.4 Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	UNIT JABATAN	S3	S2	S1	D3	D4	SMA	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	1	2	-	-	-	3
4.	Kepala Seksi	-	5	1	1	-	1	8
5.	Kepala Sub Bagian	-	1	1	-	-	-	2
6.	Pelaksana	-	2	14	3	1	-	20
7.	Pegawai Tidak Tetap	-	-	6	1	-	8	15
	JUMLAH	-	10	25	5	1	9	50

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2018

Berdasarkan Tabel 2.4. Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Tidak Tetap memiliki 9 orang Pendidikan terakhir SMA, 1 orang D4, 5 orang Diploma Tiga, 25 orang S1, dan 10 orang S2.

Tabel 2.5 Data Pegawai Berdasarkan Eselon

1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	-	1

3.	Kepala Bidang	-	-	3	-	-	3
4.	Kepala Seksi	-	-	-	8	-	8
5.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	-	2
6.	Pelaksana	-	-	-	-	20	20
	JUMLAH		1	4	10	20	35

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2018

Berdasarkan Tabel 2.5. Data Pegawai Berdasarkan Eselon, Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 4 orang, Eselon IV 10 orang, serta Non Eselon 20 orang.

Tabel 2.6 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

NO	UNIT JABATAN	S3	S2	S1	D3	D4	SMA	JUMLAH
1.	Analisis Data dan Informasi	-	-	1	-	-	-	1
2.	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	-	-	1	-	-	-	1
3.	Analisis Perencanaan atau Program	-	-	1	-	-	-	1
4.	Analisis layanan Umum	-	-	1	-	-	-	1
5.	Analisis Pariwisata	-	-	4	-	-	-	4
6.	Analisis Pengelola Keuangan	-	-	1	-	-	-	1
7.	Analisis Tata Praja	-	-	-	-	1	-	1
8.	Pranata Komputer Pertama	-	-	1	-	-	-	1
9.	Pengadministrasi Umum	-	-	-	1	-	-	1
10.	Pengadministrasi Keuangan	-	-	-	2	-	-	2
	JUMLAH			10	3	1		14

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2018

Berdasarkan Tabel 2.6. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional, ada beberapa unit jabatan, yaitu, pegawai jabatan Analisis Data dan Informasi dengan Pendidikan terakhir S1 berjumlah 1 orang. Berturut-turut dari jabatan Analisis Kebijakan Barang Milik Negara, Analisis Perencanaan atau Program, Analisis Layanan Umum dengan Pendidikan terakhir S1 berjumlah 1 orang. Sedangkan pada jabatan Analisis Pariwisata terdapat 4 orang Pendidikan terakhir S1. Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 4 orang, Eselon IV 10 orang, serta Non Eselon 20 orang.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sebagai OPD yang baru terbentuk, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara masih belum memiliki aset peralatan kantor. Adapun aset yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan kedinasan setiap harinya merupakan status pinjam dari OPD lain. Adapun aset peralatan kantor yang dipinjam tersebut ialah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Aset Peralatan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	MERK	KONDISI	KET.
1.	Kursi Eselon II	1	Unit		Baik	Pinjam
2.	Kursi Eselon III	4	Unit		Baik	Pinjam
3.	Kursi Eselon IV	7	Unit		Baik	Pinjam
4.	Kursi Staf	16	Unit		Baik	Pinjam
5.	Kursi Rapat	23	Unit		Baik	Pinjam
6.	Kursi Sofa/tamu	1	Set		Baik	Pinjam
7.	Meja Eselon II	1	Unit		Baik	Pinjam
8.	Meja Eselon III	1	Unit		Baik	Pinjam
9.	Meja Eselon IV	6	Unit		Baik	Pinjam
10.	Meja Staf	16	Unit		Baik	Pinjam
11.	Meja Rapat	4	Unit		Baik	Pinjam
12.	Meja Tamu	1	Unit		Baik	Pinjam
13.	Lemari	2	Unit		Baik	Pinjam
14.	AC	4	Unit	Samsung, Panasonic	Baik	Pinjam
15.	Papan Tulis	2	Unit		Baik	
16.	Printer	7	Unit	Canon, Epson, HP Laser Jet	Baik	Pinjam
17.	Papan Nama	7	Unit		Baik	
18.	Absen Fingerprint	1	Unit		Baik	
19.	Mesin Tik	1	Unit		Baik	Pinjam

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, 2017

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA

Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah wilayah baik kabupaten dan kota sebanyak lima wilayah yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Tana Tidung. Provinsi ini memiliki luas wilayah 72.567,49 km<sup>2</sup>. Dengan memiliki 4 Kabupaten dan 1 Kota, Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi wisata yang menjanjikan dari setiap daerah. Adapun wisata yang ada di Kabupaten Malinau ialah Desa Wisata Setulang, Desa Wisata Long Alango, Desa Wisata Apau Ping, Desa Wisata Pulau Sapi dan Objek Wisata Semolon. Tidak lupa pula bahwa Kabupaten Malinau memiliki Taman Nasional Kayan Mentarang dengan luas total ±1.030.170 ha dan



luas hutan lindung yang dimiliki adalah seluas  $\pm 744.647$  ha. Lain halnya dengan kota Tarakan, kota ini merupakan pintu gerbang dari Provinsi Kalimantan Utara. Daerah yang menjadi satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan kota yang semakin padat seiring semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan memiliki banyak tempat wisata bagi masyarakat kota Tarakan. Adapun wisata yang ada seperti Pantai Amal, Wisata Persemaian, Kawasan Konservasi Hutan Mangrove, Agro Wisata Karungan, Embung Persemaian, Rumah Bundar dan Kebun Anggrek serta masih banyak lainnya.

Adapun gambaran kinerja Dinas Pariwisata mengenai indikator kinerja dan realisasi anggaran tidak dapat dijabarkan karena Dinas Pariwisata baru dibentuk pada tahun 2016 dan memulai aktif sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2017.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1 Tantangan**

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

- a. Infrastruktur dan fasilitas wisata yang ada di Kalimantan Utara tidak memadai. Hanya beberapa wilayah yang memiliki infrastruktur dan fasilitas wisata yang cukup memadai seperti Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan;
- b. Perkembangan pariwisata daerah lain yang cukup berkembang pesat;
- c. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih lemah dalam pengelolaan pariwisata dengan kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi baru dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk.

### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan peluang yang dihadapi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

- a. Kalimantan Utara memiliki konservasi dan Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di Kabupaten Malinau yang menjadi daya tarik wisata terutama wisatawan asing;
- b. Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata cukup besar;
- c. Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi yang mendukung;
- d. Kondisi sosial masyarakat cukup mendukung.

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

---

### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Identifikasi permasalahan berguna untuk menajamkan rumusan tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja *outcome* tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah, kebijakan nasional (dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata), dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi). Berikut ini uraian selengkapnya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, maka didapatkanlah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut:

#### a. Permasalahan di Bidang Pariwisata:

##### 1. Rendahnya kunjungan wisata ke Kalimantan Utara.

Rendahnya kunjungan wisata ini disebabkan sarana promosi ini karena baru terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri, dan baru terbentuknya SKPD khususnya di Bidang Pariwisata. Sehingga kunjungan wisata ke Kalimantan Utara belum sebanyak dibanding Provinsi Lain terutama Kalimantan Timur sebagai induk dari wilayah Kalimantan Utara;

2. Aksesibilitas transportasi menuju obyek wisata di Kalimantan Utara kurang memadai.

Pada dasarnya salah satu alasan wisatawan mengunjungi suatu obyek wisata adalah karena mudahnya menjangkau kawasan atau obyek. Kalimantan utara mempunyai daerah atau kawasan yang sangat luas dan terkendala transportasi umum yang belum lancar dan terhubung daerah satu dengan lainnya secara mudah dan murah;

3. Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pada objek wisata di Kalimantan Utara.

Ketersediaan sarana prasarana ini menyangkut kenyamanan dan penyediaan sesuatu yang tertata baik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan kenangan dan keindahan (sapta pesona) dalam menikmati obyek wisata;

4. Obyek dan daya tarik wisata berbasis *ecotourism* belum tergali secara maksimal.

Kalimantan Utara mempunyai keunikan sendiri dalam bentangan alamnya yaitu kawasan hutan tropis yang sangat luas dibanding dengan daerah lain di Indonesia, beraneka ragam habitat tumbuhan dan hewan menjadi daya tarik tersendiri dan juga sebagai isu strategis dalam pemanfaatan dan perlindungannya.

5. Masih rendahnya investasi di bidang pariwisata di Kalimantan Utara.

Kalimantan Utara menjadi primadona bagi investor dalam hal sumber daya alamnya dibidang batubara, minyak dan perkebunan. Keperpihkan investor pada bidang kepariwisataan perlu didukung untuk diyakinkan bahwa kepariwisataan dapat bersinergi dengan sumber daya alam lainnya yang ada di Kalimantan Utara dan nantinya diharapkan dapat mengganti keberadaan batubara, minyak dan perkebunan.

6. SDM bidang Pariwisata yang belum memadai.

## **3.2.TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

### **3.2.1 Visi**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, maka visi RPJMD menggunakan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang telah dilantik. Dengan demikian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

**“Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang  
Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih  
dan Berwibawa”**

Posisi Visi untuk tahun 2016-2021 atau jangka menengah ini, dalam skenario jangka panjang nasional 2005-2025, berada pada periode RPJM Nasional tahapan ke III (2016-2019) yang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke II. Dinyatakan dalam RPJPN, tahapan periode pembangunan ke III ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Mempertimbangkan beberapa butir penting tersebut maka pernyataan visi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Mandiri:** Inti dari bagian visi Mandiri adalah terjadinya proses pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang mandiri.

Sebagai provinsi yang dicita-citakan mandiri, diharapkan akan mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan

ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian tidak berarti mengisolasi diri melainkan tetap memahami saling ketergantungan dengan daerah lain dalam hubungan yang saling mengisi dan bersifat proaktif. Beberapa permasalahan penting yang terkait dengan kemandirian ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energi serta aspek pembangunan lainnya dengan penekanan pada aspek sumber daya manusia menuju Kalimantan Utara yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran diupayakan terjadi pada semua aspek kehidupan. Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

**b. Aman dan Damai** : bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah dengan kondisi **perpaduan kemajemukan** masyarakat yang aman dan damai untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara demografis, masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara merupakan perpaduan dari berbagai etnis baik yang merupakan penduduk asli maupun pendatang yang pada saat ini dan masa mendatang harus bahu membahu memajukan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Kemajemukan ini haruslah diarahkan untuk menjadi potensi pembangunan yang kondusif dengan menjaga suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat dan keragaman kemampuan. Secara geografis Kalimantan Utara merupakan serambi depan bangsa yang berhadapan dengan negara lain, oleh karena itu suasana aman dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI menjadi salah satu yang penting untuk diwujudkan. Pertahanan dan keamanan NKRI merupakan urusan yang secara yuridis formil menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun Provinsi Kalimantan Utara haruslah juga berupaya menciptakan keamanan wilayah sesuai tugas dan kewenangannya karena dampak keamanan wilayah akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Demikian pula sebagai daerah yang termasuk berjarak cukup jauh dari pemerintahan pusat, penegakan hukum

sesuai ketentuan juga harus diwujudkan untuk mendukung suasana aman dan damai masyarakat Kalimantan Utara.

**c. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa:** bagian dari visi ini mengarahkan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel. Sebagai provinsi yang baru, Kalimantan Utara harus memulai dengan dasar yang baik, oleh karena itu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi penting untuk diwujudkan. Pemerintahan yang bersih dan kemudian berdampak pada kewibawaan menjadi upaya perwujudan pondasi dibangunnya Provinsi Kalimantan Utara yang maju dan baik di masa depan. Dimensi lain yang harus diwujudkan dalam membuat pemerintahan yang berwibawa adalah diadakannya sosok pemerintahan daerah berupa berbagai sarana dan prasarana serta kemudahan untuk melayani masyarakat Kalimantan Utara.

### 3.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mewujudkan visi **Berpadu dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa** yang telah ditetapkan, ada tiga misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri
2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah Provinsi yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya dengan memiliki keindahan alam, kekayaan



budaya dan keramahan pelayanan. Karakteristik Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi termuda ditandai dengan melimpahnya sumber daya alam yang melimpah. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, perlu dikedepankan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Peran dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sangat penting dalam rangka mendorong terselenggaranya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan telaah terhadap tiga misi tersebut, maka Dinas Pariwisata secara langsung menunjang pencapaian Misi ke-1: Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Misi ke-1 dalam RPJMD dijabarkan kedalam upaya-upaya yang mendukung pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan visi Kalimantan Utara yang mandiri. Oleh karena itu dirumuskan berbagai hal yang harus dilakukan untuk menjabarkan misi ke-1 ini antara lain penggunaan bahan dan produk lokal dan ekonomi kreatif dalam proses pelayanan di bidang pariwisata yang memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Tujuan yang ada di Misi ke-1 ini sesuai dengan Dinas Pariwisata yaitu kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas sehingga tercipta kemandirian sebagai mesin ekonomi penghasil devisa.

### **3.3.TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN PARIWISATA**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, maka dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata 2015-2019.

#### **3.3.1Visi Kementerian Pariwisata**

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu:

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni: “MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA DAPAT MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA”. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

### **3.3.2 Misi Kementerian Pariwisata**

Berdasarkan visi Kementerian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah:

- 1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;

- 2) Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- 3) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
- 4) Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

### **3.3.3 Tujuan Kementerian Pariwisata**

Berdasarkan visi misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
- 2) Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
- 3) Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif; dan
- 4) Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

### **3.3.4 Sasaran Kementerian Pariwisata**

Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata memiliki 11 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015-2019. Setiap sasaran strategis Kemenparekraf memiliki indikator kinerja serta target yang harus dicapai setiap tahunnya sebagai ukuran kinerja dari Kemenparekraf yang akan dipaparkan pada bagian berikut.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019

TUJUAN		SASARAN KEMENTERIAN		INDIKATOR		TARGET					PENANGGUNG
						2015	2016	2017	2018	2019	Jawab
1	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS DESTINASI PARIWISATA	1	Meningkatkan Kualitas Destinasi Pariwisata	1	Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi)	27	34	34	34	34	DEPUTI BIDANG PENGEMBA NGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
				2	Jumlah fasilitas peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (lokasi)	15	25	25	25	20	
				3	Jumlah fasilitas pemberdayaan	34	34	34	34	34	

				masyarakat (provinsi)						
				4	Jumlah fasilitas peningkatan tata kelola destinasi	25	25	25	25	25
2	MEWUJUDKAN INDUSTRI PARIWISATA YANG MAMPU MENGGERAKKAN PERKONOMIAN SOSIAL	2	Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	5	Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase)	3,6	3,7	3,8	3,9	4
		3	Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	6	Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)	11,3	11,7	12,4	12,7	13

3	MEMAKSIMALKAN PRODUKTIVITAS KINERJA PEMASARAN PARIWISATA DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI PEMASARAN	4	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap produk Domestik Bruto (PDB) Nasional	7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)	4	5	6	7	8	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA
		5	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	8	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)	10	12	15	17	20	
		6	Meningkatnya jumlah penerimaan devisa	9	Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)	144	172	182	223	280	
	TERPADU SECARA EFEKTIF, DAN BERTANGGUNG JAWAB SERTA YANG ITENSIF, INOVATIF DAN INTERAKTIF										



		7	Meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	10	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	255	260	265	270	275	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA
		8	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	11	Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp)	191.3	223.6	227.9	232.2	236.5	
4	MEWUJUDKAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN YANG MAMPU MENSINERGIKAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA, PEMASARAN PARIWISATA, DAN INDUSTRI PARIWISATA	9	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata	12	Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang di sertifikasi (orang)	17,500	35,000	35,000	35,000	35,000	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
				13	Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan						

SECARA PROFESIONAL, EFEKTIF DAN EFESIEN DAN MENCAPAI PRODUKTIFITAS MAKSIMAL			yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)	1,750	1,800	1,900	1,950	2,000		
	10	Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi diLingkungan Kementerian Pariwisata	14	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	70%	75%	80%	85%	90%	
	11	Meningkatkan kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata	15	Opini Keuangan Kementerian Pariwisata (Predikat)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	SEKRETARIAT KEMENTERIAN
			16	Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)	A	A	A	A	A	

### 3.4. TELAAHAN RTRW DAN KLHS

#### 3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Sampai dengan penyusunan rancangan akhir Renstra disusun RTRW Provinsi Kalimantan Utara belum ditanda tangani, dengan demikian tidak dapat dilakukan telaahan terhadap RTRW.

#### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Berdasarkan KLHS Provinsi Kalimantan Utara adapun yang berkaitan dengan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Kajian Dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Utara

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS
1.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	1. Dampak yang diakibatkan dari degradasi mangrove dan terumbu karang terhadap program yang ada di RTRW adalah terhadap kegiatan perikanan tangkap, budidaya dan pariwisata.

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa KLHS Provinsi Kalimantan Utara yang berkaitan dengan pariwisata ialah degradasinya mangrove yang diharapkan setiap program/kegiatan yang dilaksanakan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yaitu hutan mangrove yang ada di kawasan Provinsi Kalimantan Utara.

### 3.5.PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata, selain berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara kebudayaan dengan pariwisata maupun antara pariwisata dengan ekonomi kreatif.

Saat ini pembanguna kebudayaan sering dihubungkan dengan kegiatan pariwisata. Kebudayaan dikemas semenarik mungkin untuk dijual kepada wisatawan dan tampilan unruk mendapatkan keuntungan ekonomi begi sekelompok orang. Sehubungan hal tersebut diperlukan pemahaman yang benar tentang hubungan kebudayaan dan pariwisata agar kebudayaan daerah tidak menjadi korban penyebaran kebudayaan asing atau luar yang disebabkan oleh kegiatan pariwisata.

Terdapat beberapa hal untuk memahami hubungan antara kebudayaan, pariwisata, industri dan ekonomi kreatif, yaitu:

1. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia dengan segala hubungannya. Kebudayaan bertujuan untuk :
  - a. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat dalam era globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan lingkungan;
  - b. Melestarikan keanekaragaman kebudayaan suku bangsa;
  - c. Menciptakan perkehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang mandiri, bermartabat, maju, adil dan makmur.
2. Kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Kepariwisataan

bergantung pada keunggulan daya tarik wisata, kualitas sarana dan prasarana di destinasi wisata dan keberadaan industri pariwisata.

3. Ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.

Pembangunan pariwisata dirancang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, sebab masyarakat lokal yang paling dekat hubungannya dengan tempat wisata. Masyarakat perlu diberdayakan agar mereka mempunyai kemampuan untuk dapat berperan dalam program pariwisata. Pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan bekal kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh keuntungan dari bisnis pariwisata. Peran pemerintah adalah untuk memajukan pariwisata yang berbasiskan kepentingan masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah dan memberikan bimbingan dan bantuan modal usaha.

Pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan kemitraan yang koheren antara para pelaku kepariwisataan, masyarakat, usaha swasta dan pemerintah daerah. Produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat. Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.

Kemajuan teknologi di bidang transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK, harus pula diimbangi dengan upaya mengangkat unsur budaya daerah yang semakin besar perannya dalam membentuk karakter dan identitas bangsa serta meningkatkan keunggulan kompetitif. Pesatnya

perkembangan teknologi komunikasi telah memacu terjadinya kontak antarbudaya secara lebih intensif, baik secara personal (tatap muka) maupun impersonal, melalui berbagai media seperti radio, televisi, komputer, internet, koran, dan majalah.

Isu-isu strategis terhadap penyelenggaraan kebudayaan dan pariwisata di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai berikut:

1. Rendahnya kunjungan wisatawan ke Kalimantan Utara.  
Rendahnya kunjungan wisata ini disebabkan sarana promosi ini karena baru terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri, dan baru terbentuknya SKPD khususnya di Bidang Pariwisata. Sehingga kunjungan wisata ke Kalimantan Utara belum sebanyak dibanding Provinsi Lain terutama Kalimantan Timur sebagai induk dari wilayah Kalimantan Utara;
2. Aksesibilitas transportasi menuju obyek wisata di Kalimantan Utara kurang memadai.  
Pada dasarnya salah satu alasan wisatawan mengunjungi suatu obyek wisata adalah karena mudahnya menjangkau kawasan atau obyek. Kalimantan Utara mempunyai daerah atau kawasan yang sangat luas dan terkendala transportasi umum yang belum lancar dan terhubung antara daerah satu dengan lainnya secara mudah dan murah.
3. Rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana pada obyek wisata di Kalimantan Utara.  
Ketersediaan sarana prasarana ini menyangkut kenyamanan dan penyediaan sesuatu yang tertata baik untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan kenangan dan keindahan (sapta pesona) dalam menikmati obyek wisata.
4. Obyek dan daya tarik wisata berbasis *ecotourism* belum tergali secara maksimal.  
Kalimantan Utara mempunyai keunikan sendiri dalam bentangan alamnya yaitu kawasan hutan tropis yang sangat luas dibanding dengan

daerah lain di Indonesia. Beraneka ragam habitat tumbuhan dan hewan menjadi daya tarik tersendiri dan juga sebagai isu strategis dalam pemanfaatan dan perlindungannya.

5. Seni dan budaya sebagai karakter jati diri bangsa belum tergali secara optimal.

Arus modernisasi dunia yang semakin pesat berkembang seiring dengan berkembangnya dunia teknologi telekomunikasi merupakan ancaman sekaligus peluang untuk dikreasikan menjadi sesuatu yang bernilai kuat pembentuk jati diri bangsa sebagai landasan kreatifitas.

6. Masih rendahnya investasi di bidang pariwisata di Kalimantan Utara.  
Kalimantan Utara menjadi primadona bagi investor dalam hal sumber daya alamnya dibidang batubara, minyak dan perkebunan. Keberpihakkan investor pada bidang kepariwisataan perlu didukung untuk diyakinkan bahawa kepariwisataan dapat bersinergi dengan sumber daya alam lainnya yang ada di kalimantan Utara dan nantinya diharapkan dapat mengganti keberadaan batubara, minyak dan perkebunan.
7. Rendahnya pemasaran kebudayaan dan pariwisata dalam dan luar negeri.  
Pemasaran dan promosi adalah suatu usaha memperkenalkan kepada calon wisatawan dan juga calon investor untuk mengenal Kalimantan Utara dibidang budaya dan wisatanya, ini merupakan usaha dengan biaya yang tidak sedikit juga tidak bisa langsung dapat dilihat imbasnya. Perlu adanya kesinambungan dan kontinuitas serta kreatifitas agar budaya dan wisata Kalimantan Utara dapat diterima selain itu daerah lainnya juga semakin bersolek dalam hal perebutan calon wisatawan dan calon investornya.
9. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kebudayaan dan pariwisata.  
Saat ini kondisi kepariwisataan di Kalimantan Utara bisa dikatakan sebagai dilema, dalam artian belum mendatangkan nilai ekonomis yang

lebih baik dibanding sektor lainnya sebagai tumpuhan hidup. Perlu pemahaman dan keuletan dalam pengembangannya. Merasa memiliki atas seni budaya daerah dan menjadi landasan hidup merupakan inti keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataannya.

8. SDM bidang kebudayaan dan pariwisata belum memadai.  
SDM yang ada belum mampu mewarnai luasan wilayah dan beragamnya suku dan seni budaya di Kalimantan Utara selain itu masih kurangnya lembaga pendidikan untuk membina dan mencetak SDM bidang seni budaya.



## BAB IV TUJUAN & SASARAN

---

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran ditetapkan dalam lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara sebagai acuan dalam menyusun Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, kondisi *base-line* pada awal periode, dan target capaian setiap tahun untuk selama periode lima tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, sejumlah tujuan diupayakan pencapaiannya guna berkontribusi pada perwujudan visi tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

**“Meningkatkan kontribusi kepariwisataan Kaltara dalam mendukung perekonomian daerah”.**

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 tersebut di atas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengembangan destinasi wisata daerah yang berkualitas dan berdaya saing nasional.
2. Rata-rata lama tinggal wisatawan

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (2021)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran				
					2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kontribusi kepariwisataan Kaltara dalam mendukung perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	837.095	Meningkatnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri	Persentase peningkatan wisatawan	1%	1%	27%	28%	29%
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Tingkat rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan	3 Hari	3,5 Hari	3,5 Hari	4 Hari	4 Hari

### 5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara ini ialah sebagai dokumen perencanaan yang bersifat mengikat bagi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan program kerja dan indikator kinerja sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk periode lima tahun ke depan.

Secara lebih mendetail terkait koneksitas atas tujuan, strategi dan kebijakan kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel 4.2. Indikator kinerja sudah memuat pencapaian target kinerja yang harus dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan (2016-2021). Target tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pariwisata sekaligus mengevaluasi kinerja yang umumnya tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kontribusi kepariwisataan Kaltara dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri	Persentase peningkatan wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan destinasi wisata daerah</li> <li>- Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur destinasi wisata</li> <li>- Meningkatkan pembinaan terhadap obyek wisata</li> <li>- Meningkatkan pameran dan promosi potensi pariwisata daerah</li> <li>- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata</li> </ul>
	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Tingkat rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pelatihan SDM dan pelaku pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi dengan pelaku pariwisata</li> <li>- Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi pada pelaku pariwisata</li> <li>- Menganalisis kebijakan untuk meningkatkan industri pariwisata Kalimantan Utara</li> </ul>

## BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA

### PENDANAAN

---

Program merupakan instrumen kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra pada setiap program terdapat berbagai kegiatan yang mendukung serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka disusunlah langkah-langkah operasional untuk mencapai arah kebijakan pembangunan selama lima tahun kedepan (2016-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, fokus kegiatan pada :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - m. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- o. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, fokus kegiatan pada :
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - b. Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, fokus kegiatan pada :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, fokus kegiatan pada:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, fokus kegiatan pada :
  - a. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
  - b. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
  - c. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
  - d. Koordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata
  - e. Penyiapan Percepatan Pendukung Pembangunan Pariwisata
  - f. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
  - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata
  - h. Pengembangan Ekonomi Kreatif
  - i. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam negeri
  - j. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di luar negeri
- 6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, fokus kegiatan pada :
  - a. Pengembangan objek pariwisata unggulan
  - b. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
  - c. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
  - e. Pengembangan daerah tujuan wisata
  - f. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan PERDA di bidang Pariwisata
  - g. Sosialisasi Sadar Wisata
  - h. Pembuatan Buku Profil Destinasi Pariwisata
7. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, fokus kegiatan pada :
- a. Kajian Pengembangan kepariwisataan
  - b. Pengembangan SDM di bidang pariwisata
  - c. Forum Komunikasi kemitraan pariwisata Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan
  - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
  - e. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan
- Adapun rincian dari rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dijelaskan terlampir.

**Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Utara**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target (2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian padaTahun Awal	Target Kinerja Program dan		Unit Kerja Pelaksana	Lokasi					
									2017								
									target	Rp							
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Meningkatkan kepariwisataan Kaltara untuk mendukung perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	837,095	Meningkatnya pengembangan destinasi wisata daerah yang berkualitas dan berdaya saing nasional	Persentase potensi destinasi wisata yang dikembangkan	3.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata yang Dibina	2 Obyek	2 Obyek	525,000,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata						
					3.04.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan				-		-	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara		
					3.04.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang dikembangkan				1 Obyek		525,000,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara		
					3.04.16.03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Jumlah koordinasi pembangunan objek pariwisata							-	-	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.16.04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan destinasi obyek pariwisata							-	-	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.16.05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Jumlah destinasi tujuan wisata yang dikembangkan se-kaltara				-		-	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara		
					3.04.16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah dokumen Naskah Akademik dan Rancangan PERDA RIPPAPROV				-		-	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara		
					3.04.16.08	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan PERDA di bidang Pariwisata	Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata				-		-	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara		
					3.04.16.xx	Sosialisasi Sadar Wisata	Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata				-		-	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara		
			Meningkatnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri	Persentase peningkatan wisatawan	3.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan	262,220	264,842	6,622,390,000	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
					3.04.15.01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah dokumen pengembangan dan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri		-	-	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara					



					3.04.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah sistem informasi manajemen kepariwisataan yang dibangun dan dikelola		-	-	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.15.03	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Jumlah kegiatan kerjasama promosi pariwisata (foto, publikasi dan putra/putri pariwisata) yang dilaksanakan	1 Kali		1,694,850,000	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata	Jumlah rapat koordinasi antar Kabupaten/Kota di Bidang Pariwisata	1 Kali		340,175,000	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata	7 Kali		4,587,365,000	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri
					3.04.15.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah dokumen penyediaan informasi kinerja kepariwisataan Prov. Kaltara		-	-	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.15.xx	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan pengembangan ekonomi kreatif		-	-	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.15.xx	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam negeri	Jumlah Promosi Pariwisata dalam Negeri		-	-	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.15.xx	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di luar negeri	Jumlah Promosi Pariwisata luar Negeri		-	-	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.17	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang terbentuk	5 Kelompok	10 Kelompok		Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	
					3.04.17.xx	Kajian Pengembangan kepariwisataan	Jumlah Dokumen Kajian Akademik pariwisata				Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.17.xx	Pengembangan SDM di bidang pariwisata	Jumlah SDM yang dilatih di bidang pariwisata		-	-	Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.17.xx	Forum Komunikasi kemitraan pariwisata	Jumlah koordinasi, rapat sertifikasi usaha dan workshop yang dilaksanakan				Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.17.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi program peningkatan kemitraan		-	-	Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara

					3.04.17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		-	-	Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	5 Kabupaten/Kota Provinsi Kaltara
					3.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	-	100%	2,484,950,000	Sekretariat	
					3.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim		600 lembar	5,900,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	58,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		-	-	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan		12 Bulan	740,050,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	47,500,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		-	-	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan		12 Bulan	85,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan		12 Bulan	59,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan gedung kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		15 Unit	17,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		48 Unit	318,325,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		7 Unit	5,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		5.420 Eks	15,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		1040 Porsi	45,800,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		75 Kali	668,550,000	Sekretariat	Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara

					3.04.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah		50 Kali	419,825,000	Sekretariat	Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Utara
					3.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	-	100%	888,000,000	Sekretariat	
					3.04.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		11 Unit	638,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.02.11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah gedung yang disewa		1 Unit	200,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 Unit	15,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		13 Unit	35,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		-	-	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					*	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		-	-	Sekretariat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan
					3.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	41%	41,000,000	Sekretariat	
					3.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal		5 Orang	41,000,000	Sekretariat	Dalam dan Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara
JUMLAH										10,561,340,000		

**Tabel 6.2 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Utara**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target (2021)	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Pelaksana	Lokasi
									2018		2019		2020		2021					
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kepariwisataan Kaltara untuk mendukung perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	837,095	Meningkatnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri	Persentase peningkatan wisatawan	3.02:16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan	0 Obyek	2 Obyek	11,364,435,000	2 Obyek	2,156,975,000	2 Obyek	2,300,000,000	2 Obyek	2,100,000,000	10 Obyek	17,921,410,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	
					3.02.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan		1 Obyek	361,536,000	2 Obyek	550,000,000	2 Obyek	550,000,000	2 Obyek	550,000,000	7 Obyek	2,011,536,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang dikembangkan		1 Unit	9,389,880,000	1 Unit	606,975,000	1 Unit	550,000,000	1 Unit	550,000,000	5 Unit	11,096,855,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.16.04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Jumlah koordinasi pembangunan objek pariwisata		-	-	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	6 Kali	300,000,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dalam dan Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.16.05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengembangan destinasi obyek pariwisata		1 laporan	71,200,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	4 laporan	371,200,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.16.06	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah destinasi tujuan wisata yang dikembangkan se-kaltara		1 Destinasi	457,984,000	2 Destinasi	500,000,000	2 Destinasi	500,000,000	2 Destinasi	500,000,000	7 Destinasi	1,957,984,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.16.08	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan PERDA di bidang Pariwisata	Jumlah dokumen Naskah Akademik dan Rancangan PERDA RIPPAPROV		1 Dokumen	719,035,000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	719,035,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.16.09	Pembuatan buku profil destinasi wisata	Jumlah buku profil destinasi pariwisata yang tersedia		25 Buah	182,400,000	-	-	30 Buku	200,000,000	-	-	-	382,400,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.16.xx	Sosialisasi Sadar Wisata	Jumlah peserta sosialisasi sadar wisata		100 orang	182,400,000	200 Orang	200,000,000	200 Orang	200,000,000	200 Orang	200,000,000	650 Orang	782,400,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.16.xx	Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi	Jumlah Kab/Kota kawasan yang di fasilitasi pemberdayaan masyarakat		-	-	5 Kab/Kota	100,000,000	5 Kab/Kota	100,000,000	5 Kab/Kota	100,000,000	5 Kab/Kota	300,000,000	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02:15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan	264,842	267,490	2,938,412,800	271,503	3,200,000,000	276,933	4,200,000,000	283,856	3,900,000,000	1,099,782	14,238,412,800	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
					3.02.15.01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah dokumen pengembangan dan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri		1 Dokumen	177,792,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	200,000,000	-	-	2 Dokumen	677,792,000	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah sistem informasi manajemen kepariwisataan yang dibangun dan dikelola		1 sistem	348,932,800	1 sistem	250,000,000	1 sistem	200,000,000	1 sistem	150,000,000	1 sistem	948,932,800	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.15.03	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Jumlah kegiatan kerjasama promosi pariwisata (foto, publikasi dan putra/putri pariwisata) yang dilaksanakan		2 Kali	378,000,000	1 Kali	250,000,000	2 Kali	350,000,000	1 Kali	250,000,000	7 Kali	1,228,000,000	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dalam dan Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara

					3.02.15.04	Penyusunan perencanaan pembangunan pariwisata	Jumlah dokumen pendukung pembangunan pariwisata		1 Dokumen	229,488,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	879,488,000	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.15.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata	-	-	-	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	3 laporan	300,000,000	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.15.12	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelatihan pengembangan ekonomi kreatif	200 orang		127,600,000	200 orang	150,000,000	200 orang	150,000,000	200 orang	200,000,000	800 Orang	627,600,000	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.15.13	Peleaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam negeri	Jumlah Promosi Pariwisata dalam Negeri	4 Kali		1,028,200,000	4 Kali	1,200,000,000	3 Kali	1,500,000,000	3 Kali	1,500,000,000	20 Kali	5,228,200,000	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dalam Negeri
					3.02.15.14	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di luar negeri	Jumlah Promosi Pariwisata luar Negeri	2 Kali		648,400,000	2 kali	700,000,000	2 kali	1,500,000,000	2 kali	1,500,000,000	9 Kali	4,348,400,000	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Luar Negeri
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	Tingkat rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan	3.02:17	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase usaha pariwisata yang dibina	31%	46%	1,085,990,400	62%	1,300,000,000	77%	1,450,000,000	92%	1,550,000,000	92%	5,385,990,400	Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	
					3.02.17.06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi program peningkatan kemitraan	-	1 laporan	74,976,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	100,000,000	4 laporan	374,976,000	Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	-	2 Kali	216,692,800	1 Kali	200,000,000	1 Kali	200,000,000	1 Kali	200,000,000	5 Kali	816,692,800	Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.17.16	Kajian Pengembangan kepariwisataan	Jumlah Dokumen Kajian Akademik pariwisata	-	1 Dokumen	221,204,800	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	#REF!	Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.17.17	Pengembangan SDM di bidang pariwisata	Jumlah SDM yang dilatih di bidang pariwisata	-	200 Orang	499,985,600	200 Orang	650,000,000	200 Orang	650,000,000	200 Orang	750,000,000	800 Orang	#REF!	Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.17.18	Forum Komunikasi kemitraan pariwisata	Jumlah koordinasi, rapat sertifikasi usaha dan workshop yang dilaksanakan	-	3 Kali	364,800,000	3 Kali	400,000,000	3 Kali	600,000,000	3 Kali	600,000,000	12 Kali	1,964,800,000	Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM	Provinsi Kalimantan Utara
					3.02:01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	-	100%	2,251,640,000	100%	2,267,645,000	100%	2,263,551,155	100%	2,255,402,178	100%	9,038,238,333	Sekretariat	
					3.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat		100 Lembar	11,000,000	100 lembar	11,000,000	100 lembar	11,000,000	100 lembar	11,000,000	1000 lembar	44,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	60,000,000	12 Bulan	39,000,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	40,000,000	60 Bulan	179,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan		14 Unit	15,000,000	15 Unit	20,000,000	15 Unit	20,000,000	15 Unit	20,000,000	15 Unit	75,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan		12 Bulan	995,490,000	12 Bulan	800,000,000	12 Bulan	800,000,000	12 Bulan	700,000,000	60 Bulan	3,295,490,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	55,100,000	12 Bulan	55,000,000	12 Bulan	55,000,000	12 Bulan	55,000,000	60 Bulan	220,100,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		30 Unit	15,000,000	25 Unit	10,000,000	25 Unit	10,000,000	25 Unit	10,000,000	105 Unit	45,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara

					3.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan		12 Bulan	105,845,000	12 Bulan	105,845,000	12 Bulan	105,845,000	12 Bulan	107,961,900	60 Bulan	425,496,900	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 Bulan	90,000,000	12 Bulan	90,000,000	12 Bulan	85,000,000	12 Bulan	85,000,000	60 Bulan	350,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		10 Unit	7,000,000	10 Unit	10,000,000	10 Unit	10,000,000	10 Unit	10,200,000	55 Unit	37,200,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 Unit	117,550,000	10 Unit	100,000,000	10 Unit	100,000,000	10 Unit	100,000,000	90 Unit	417,550,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		7 Unit	7,000,000	6 Unit	6,800,000	6 Unit	6,706,155	6 Unit	6,840,278	32 Unit	27,346,433	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		5.420 Eks	24,155,000	1.000 Eks	20,000,000	1.000 Eks	20,000,000	1.000 Eks	20,400,000	13.840 Eks	84,555,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		2400 Porsi	68,500,000	1.440 Porsi	50,000,000	1.440 Porsi	50,000,000	1.440 Porsi	51,000,000	9.120 Porsi	219,500,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100 kali	408,000,000	100 kali	550,000,000	100 kali	550,000,000	100 kali	600,000,000	475 Kali	2,108,000,000	Sekretariat	Luar daerah Prov. Kaltara dan Luar Negeri
					3.02.01.19	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah		75 kali	272,000,000	75 kali	400,000,000	75 kali	400,000,000	85 kali	438,000,000	360 Kali	1,510,000,000	Sekretariat	Dalam Daerah Provinsi Kalimantan Utara
					3.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur		100%	699,265,000	100%	685,000,000	100%	338,185,272	100%	336,729,789	100%	2,059,180,061	Sekretariat	
					3.02.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		1 Unit	341,965,000	2 Unit	350,000,000	-	-	-	-	14 Unit	691,965,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.02.11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah gedung yang disewa		1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	800,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		1 Unit	15,300,000	1 Unit	7,000,000	1 Unit	8,500,000	1 Unit	6,000,000	1 Unit	36,800,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		15 Unit	100,000,000	15 Unit	80,000,000	15 Unit	80,000,000	15 Unit	80,000,000	15 Unit	340,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.02.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		12 Bulan	10,000,000	12 Bulan	13,000,000	12 Bulan	14,685,272	12 Bulan	15,729,789	60 Bulan	53,415,061	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					*	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		40 Stel	32,000,000	35 Stel	35,000,000	35 Stel	35,000,000	35 Stel	35,000,000	145 Stel	137,000,000	Sekretariat	Tanjung Selor, Kaltara
					3.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	41%	64%	63,000,000	86%	50,000,000	91%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	213,000,000	Sekretariat	
					3.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal		5 Orang	63,000,000	5 Orang	50,000,000	5 Orang	50,000,000	5 Orang	50,000,000	25 Orang	213,000,000	Sekretariat	Dalam dan Luar Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Jumlah										18,402,743,200		9,659,620,000		10,601,736,427		10,192,131,967		48,856,231,594		

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan keterpaduan dengan dokumen rencana daerah Provinsi Kalimantan Utara. Keterpaduan dokumen dapat dilihat pada dukungan Dinas Pariwisata terhadap pencapaian misi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun indikator kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu :

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Kunjungan Wisata	1.527.860 (2014)	1.659. 768	1.742. 239	1.824. 710	1.907. 181	1.989. 652	1.989.652
2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	599.768 Juta Rp (2015)	670.2 66	708.5 64	749.0 50	791.8 50	837.0 95	837.095
3.	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan	2 Obyek	4	6	8	10	12	12
4.	Persentase usaha pariwisata yang dibina	31%	31%	46%	62%	77%	92%	92%
5.	Persentase peningkatan wisatawan	0	1%	1%	1%	27%	28%	29%
6.	Rata-rata lama tinggal wisatawan		3 hari	3 Hari	3,5 Hari	3,5 Hari	4 Hari	4 Hari

### 8.1 PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara memberikan arah dan tujuan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen yang kuat dan dukungan seluruh *stakeholder* akan mendukung dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Meskipun demikian, diakui masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu dibenahi dan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, strategi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara ke depan berprinsip agresif dengan meningkatkan kekuatan dan menggali potensi yang ada guna meningkatkan kinerja sekaligus merebut peluang yang ada.

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 ini disusun dengan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Seluruh aspek kegiatan dianalisis dan dicantumkan dalam penyusunan Renstra. Oleh sebab itu partisipasi dari seluruh komponen institusi mutlak diperlukan baik dalam penyusunan maupun sosialisasi dokumen ini. Akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DINAS PARIWISATA**

Jl. Kapur RT. 37, Tanjung Selor 77212  
Telp (0552) 2222222  
email : pariwisata.kaltara@gmail.com

